

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Skripsi ini akan membahas mengenai kebijakan Jepang terhadap modernisasi militer China yang terus berkembang terutama sejak era pasca perang dingin terjadi. Berakhirnya perang dunia ke II menyisakan trauma yang mendalam bagi semua masyarakat dunia, tak terkecuali bagi masyarakat Jepang. Kekalahan tersebut kemudian membuat Jepang jatuh ke tangan penguasaan sekutu yaitu Amerika Serikat sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah perang dunia ke II resmi berakhir perjanjian perdamaian Jepang dan sekutu kemudian dibuat. Pada 8 September 1951 perjanjian San Francisco (*San Francisco Treaty*) ditandatangani di kota San Francisco, California, Amerika Serikat dan ditandatangani oleh 49 negara termasuk Jepang (United Nations, 1951).

Setelah berakhirnya perang dunia kedua, poros kebijakan luar negeri Jepang kemudian berubah terutama ideologi Jepang yang menggunakan sistem pasifisme. Sebelumnya Jepang terlebih dahulu menggunakan sistem imperialisme yang bertujuan untuk dapat memperluas wilayah Jepang serta menguasai wilayah lainnya dibawah kepemimpinan kaisar. Pasifisme (*pacifism*) berasal dari Bahasa latin "*pacific*" yang berarti "*peace making*" atau perdamaian. Pasifisme berkomitmen untuk selalu mendukung perdamaian dan berlawanan terhadap peperangan (Fiala, 2006).

Perubahan ideologi tersebut kemudian tertulis dalam Konstitusi Jepang artikel 9 tahun 1947 yang berisi tentang larangan terhadap militer Jepang untuk melakukan tindakan ofensif dalam menyelesaikan permasalahan

terhadap negara lain ataupun urusan internasional lainnya (Japan Kantei, 1947). Kemudian Jepang membentuk sebuah badan keamanan untuk dalam negeri yang diberi nama *Japanese Self-Defense Force* (JSDF) atau pasukan bela diri Jepang yang dibentuk pada tahun 1954 dan berada dibawah kementerian pertahanan Jepang. JSDF juga menjalin hubungan bilateral dengan Amerika Serikat yaitu tergabung dalam aliansi keamanan (Mofa.go.jp, 1951).

Jepang dan China merupakan salah satu negara yang tidak dapat disangkal terkait aktivitas ekonomi dan politiknya. Akan tetapi dalam hubungan politik kedua negara di Asia Pasifik ini tidak berjalan dengan baik terutama semenjak pasca terjadinya peperangan dan hubungan tersebut tidak kunjung membaik hingga saat ini. Akan tetapi kedua negara tersebut memiliki hubungan yang baik dalam aktivitas perekonomian (Burns, 2015). Kebangkitan China merupakan peristiwa penting yang menjadi proses terciptanya kekuatan baru di kawasan Asia. China secara perlahan bangkit menjadi salah satu negara yang mendominasi di kawasan dan kekuatan militer China yang perkembangannya sulit untuk dibendung.

Sejak adanya pemerataan kekuatan militer pada tahun 1980 an, China mempercepat keinginannya untuk menjadi negara adidaya di Asia. Peningkatan sistem pertahanan yang potensial mendorong banyak dampak positif bagi China. Adanya pemerataan tersebut direspon dunia internasional sebagai munculnya "*Revisionist Power*" yang berencana untuk mengubah sistem internasional demi tercapainya kepentingan pribadi. China memperkuat pengaruh dan posisi diplomatiknya di kawasan yang mempunyai potensi untuk melahirkan sebuah pergeseran kekuatan yang baru dengan segala

implikasinya (Lindsay, 2020).

Jepang memiliki kekhawatiran tersendiri atas modernisasi militer China yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hegemoni yang ditimbulkan oleh China di kawasan Asia mendorong Jepang untuk melakukan peningkatan anggaran militer negaranya. Pada tahun 2020 Jepang meningkatkan anggaran militer berskala besar dibandingkan anggaran belanja pada tahun-tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2019 jumlah anggaran militer Jepang sebesar 47.609 USD dan meningkat secara pesat pada tahun 2020 menjadi 48.160 USD (Trading Economics, 2020). Potensi China berkembang menjadi kekuatan baru dengan berbagai peningkatan diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, anggaran militer, serta perbaikan politik di level global. Dengan adanya modernisasi militer China tersebut menimbulkan rasa khawatir bagi Jepang karena China dapat bertransformasi menjadi ancaman masa depan yang tidak dapat diprediksi.

China dan militernya *People Liberation Army* (PLA) saat ini dapat mendominasi kekuatan militer di kawasan Asia serta memberikan ancaman nyata bagi negara-negara yang mengintervensi permasalahannya. Salah satu ancaman yang diberikan China terhadap Jepang yaitu ketika Jepang memberikan dukungan terhadap sekutunya Amerika Serikat yang berencana untuk mengintervensi permasalahan antara China dan Taiwan. Aturan "*One China Policy*" menjadi alasan sengketa tersebut. Aturan tersebut dapat dipahami sebagai hanya ada satu pemerintahan China di dunia yaitu pemerintahan China di Beijing. Rencana intervensi tersebut kemudian direspon keras oleh pemerintah China. PLA dalam konferensinya memberikan pernyataan tegas bahwa tidak segan untuk menggunakan senjata nuklir apabila Jepang

menurunkan angkatan militernya untuk membantu Taiwan bahkan hanya menurunkan satu tentara *JSDF* sekalipun (Moore, 2021).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini akan mengajukan sebuah rumusan masalah yaitu: *Bagaimana strategi Jepang menghadapi modernisasi militer China yang terus berkembang sejak pasca perang dingin pada masa kepemimpinan PM Shinzo Abe?*

## **C. KERANGKA TEORI/ KERANGKA KONSEPTUAL**

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka penulis akan menggunakan sebuah kerangka konseptual yaitu: Teori Politik Luar Negeri dan Konsep Hedging dalam menyelesaikan permasalahan politik luar negeri suatu negara.

### **POLITIK LUAR NEGERI**

Dengan tujuan untuk menentukan dan mengidentifikasi keputusan-keputusan, strategi-strategi, serta akhir dari interaksi suatu negara dengan negara lain (David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, and Jonathan Perraton, 2012). Terdapat kesepakatan di antara tentang perlunya “kebijakan luar negeri” untuk setiap negara, karena tidak ada negara yang ingin di isolasi dari negara-negara lain. Meningkatnya keterkaitan atau interaksi antar negara, menjadikan keputusan untuk tidak memiliki atau berhubungan dengan negara tertentu juga merupakan kebijakan luar negeri (Gross, 1955).

Sebuah negara tanpa adanya politik luar negeri, diibaratkan sebuah kapal selam laut yang berlayar tanpa arah. Oleh karena itu, politik luar negeri dianggap memimpin suatu negara dalam memenuhi kepentingan

nasionalnya dan mendapatkan tempat di antara masyarakat negara bangsa.

Istilah kebijakan luar negeri telah didefinisikan sebagai sebuah perilaku suatu negara terhadap negara lain. Pengambilan keputusan Kebijakan Luar Negeri suatu negara menjadi salah satu instrumen terbesar yang dimiliki suatu negara untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri dianggap sebagai aktivitas politik yang sepenuhnya dijalankan negara (AS, 2018).

George Modelski, mendefinisikannya sebagai “sistem aktivitas yang dikembangkan oleh komunitas untuk mengubah perilaku negara lain dan untuk menyesuaikan aktivitas mereka sendiri dengan lingkungan internasional. Kebijakan luar negeri harus menyoroti cara-cara negara berusaha untuk berubah, dan berhasil mengubah perilaku negara-negara lain.” Modelski, mencatat hanya aspek-aspek kebijakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku negara yang ada, sebagai tujuan utama kebijakan luar negeri. Namun, kebijakan luar negeri tidak hanya untuk mengubah, tetapi juga kelanjutan dari perilaku pada waktu yang berbeda (Neack, 2008).

Keputusan Jepang untuk melimpahkan keamanan dan militernya kepada Amerika Serikat Pasca kekalahannya pada perang dunia kedua. Pelimpahan tersebut membuat Jepang mengeluarkan kebijakan berupa undang-undang konstitusi Jepang tahun 1947 artikel 9. Di dalam isi dari perjanjian tersebut tersirat pernyataan Jepang dalam menjalin aliansi dengan Amerika Serikat. Negara-negara dengan kemampuan militer yang lemah atau rendah cenderung lebih menonjol dalam mengejar tujuan kebijakan mereka dan paling sering bergantung pada pencarian sekutu dengan kekuatan yang lebih besar

dan organisasi internasional untuk perlindungan mereka (Tomz, 2007).

Aliansi seperti hukum internasional dianggap dapat membentuk kebijakan luar negeri negara, karena pihak-pihak anggota aliansi harus menanggapi permintaan dan tuntutan sekutu mereka dan menahan diri dari merumuskan kebijakan atau mengambil tindakan yang menyinggung mitra aliansi. Aliansi berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri, Kekuatan militer suatu negara, turut menentukan strategi politik luar negeri suatu negara. Kemampuan suatu negara untuk mempertahankan perbatasannya dari agresi bersenjata memainkan peran penting baik dalam kebijakan internal maupun eksternal yang dibuat negara. Negara-negara yang mampu secara militer menjalankan kemandirian yang lebih besar dari kekuatan eksternal dalam perumusan kebijakan luar negeri mereka. Dalam konteks yang sama, peningkatan kemampuan militer suatu negara dapat mengakibatkan perubahan dalam kebijakan luar negerinya seperti politik luar negeri yang damai ke politik luar negeri yang agresif atau sebaliknya seperti yang dialami Jepang (AS, 2018).

Lingkungan internasional memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri setiap negara. Politik luar negeri secara umum adalah tentang interaksi suatu negara dengan negara lain, di tingkat internasional. Pentingnya faktor internasional dan domestic; faktor internasional memainkan peran yang lebih penting dalam menentukan kebijakan luar negeri negara. Faktor eksternal utama yang menentukan politik luar negeri suatu negara tidak terbatas pada: sistem internasional atau struktur kekuasaan, hukum internasional, organisasi internasional, aliansi, dan kekuatan militer atau perlombaan senjata. (AS, 2018).

## HEDGING

Hedging merupakan teori yang berkembang pasca terjadinya perang dingin, hedging sendiri mulai dikembangkan oleh para peneliti yang mana pada saat itu peneliti tengah melakukan penelitian mengenai dinamika politik dunia, akan tetapi teori-teori yang saat itu berkembang tidak mampu menjawab situasi yang sedang terjadi. Hedging berhubungan terhadap konteks keamanan dan pertahanan serta strategi penyesuaian agar seimbang. Terdapat dua hal yang berhubungan dengan teori hedging yaitu "*Balancing*" dan "*Bandwagoning*" yang merupakan strategi alternatif yang dikembangkan pada saat perang dingin untuk melawan kekuatan atau mengakomodasi kekuatan besar yang mengancam (John, 2019).

Pengertian dari hedging dapat diartikan sebagai penempatan posisi negara yang bertujuan untuk dapat menyeimbangkan potensi kerugian ataupun keuntungan negaranya. Menurut Kuik hedging dilakukan oleh negara kecil ketika masuk ke dalam kondisi yang mendesak, salah satu hal yang mempengaruhi hedging yaitu rivalitas yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga China. Rivalitas keduanya memaksa negara-negara kecil untuk melakukan hedging agar tidak diabaikan oleh salah satunya. Ketika "*Balancing*" maupun "*Bandwagoning*" tidak dapat dilakukan maka Hedging merupakan jalan untuk dapat bertahan ditengah-tengah keadaan yang tidak stabil. Hal tersebut normalnya menjadi sebuah pilihan dari ketidakpastian akan siapa penguasa selanjutnya yang dikemudian hari akan mendominasi dunia. Meskipun bukanlah pilihan terbaik, akan tetapi hedging mampu menempatkan negara yang lemah untuk menyeimbangkan kondisi serta memberikan potensi nilai kerugian yang kecil dan memberikan keuntungan yang optimal kepada

negara lemah serta menempatkan negara dalam posisi yang cukup aman (Kuik, 2021).

Menurut Evelyn Goh (Goh, 2006) hedging merupakan sekumpulan strategi yang menghindari sebuah situasi dimana negara tidak dapat memutuskan alternatif *balance*, *bandwagoning* dan netralitas sehingga negara memposisikan diri berada ditengah-tengah tanpa harus memilih berpihak kepada satu sisi tanpa mengabaikan sisi lainnya. Hedging seringkali berhubungan kepada status keamanan terlebih struktur keamanan di kawasan Asia-Pasifik yang bersifat dinamis sejak pasca perang dingin.

Strategi *hedging* merupakan strategi dimana suatu negara selalu waspada akan ketidakpastian unsur kerja sama dan kompetisi sekaligus. Strategi tersebut umumnya dilakukan oleh negara kecil hingga negara menengah. 5 indikator utama dalam strategi *hedging* antara lain *indirect balancing*, *limited bandwagoning*, *dominance denial*, *pragmatism economics*, dan *binding engagement* (Suhito, 2018).

Balancing menurut H.C. Palmer dan N.D. Perkins (Sheehan, 1996) dalam hubungan internasional dapat diartikan sebagai penyeimbang terhadap kekuatan besar yang ada (*Super Power Country*). Balance of power mengacu pada keseimbangan antara negara-negara dan membentuk aliansi untuk mencegah satu entitas menjadi terlalu kuat yang merupakan penolakan terhadap dominasi. Menurut Kenneth Waltz, *bandwagoning* adalah kebalikan dari *balancing*, yaitu upaya sebuah negara untuk dapat bergabung atau memihak kepada negara yang lebih kuat dan membangun hubungan (Aliansi). Akan tetapi negara tersebut harus rela untuk menyerahkan otonominya untuk tindakan internasional melindungi negara aliansinya (Cladi & Locatelli, 2015).

Terdapat dua bentuk dari strategi hedging yang pertama yaitu soft hedging. Pendekatan soft hedging ialah menggunakan binding engagement terhadap negara tujuan. Maksudnya adalah menjalin hubungan kerjasama terhadap negara yang menimbulkan *security dilemma*. Contohnya yaitu normalisasi hubungan antara Jepang dan China pada tahun 1972 yang bertujuan untuk tercapainya kepentingan perekonomian kedua negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah hard hedging (Hornung, 2014).

Hard hedging menggunakan balancing sebagai langkah untuk dapat menyeimbangi kekuatan China, terdapat dua acara Jepang untuk melakukan balancing, yaitu eksternal balancing dan internal balancing. Dalam menjalankan eksternal balancing, Jepang mengambil langkah dengan mempererat aliansinya bersama AS di kawasan Asia Pasifik yaitu menyeimbangkan kekuatan China. Sedangkan internal balancing yang Jepang lakukan adalah dengan memperbarui National Defense Program Guidelines dan mengembangkan angkatan militernya (Hornung, 2014).

Dalam hal ini, Jepang mengambil langkah dengan menggunakan strategi *hedging* karena dipengaruhi oleh *security dilemma* atas modernisasi militer China yang terus meningkat serta hegemoni China dikawasan Asia yang menjadikan China sebagai ancaman yang potensial terhadap negara-negara kecil di Asia. Berdasarkan penjelasan diatas, terkait sikap Jepang yang menjalin hubungan kepada kedua negara dengan besar seperti China dan AS merupakan salah satu ciri negara yang menggunakan strategi hedging karena memiliki rasa khawatir akan diabaikan sehingga memosisikan diri berada ditengah.

## **D. HIPOTESA**

Berdasarkan pada kerangka konseptual diatas, penulis, menarik sebuah kerangka argumen sebagai berikut: *Kebijakan pemerintah Jepang terhadap modernisasi militer China adalah dengan menerapkan strategi hedging. Militer China dianggap semakin menjadi ancaman bagi kawasan Asia Timur karena perkembangan militer PLA tidak dapat dibendung, selain itu adanya rivalitas antara AS – China di kawasan tersebut membuat Jepang merasa terancam. Dengan strategi hedging tersebut, Jepang berupaya dengan menjalin hubungan keamanan dan pertahanan dengan AS serta tetap menjalin hubungan perekonomian dengan China.*

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan pada tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu cara yang digunakan dalam menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas pengamatan, dan penggalian dokumen (Wahidmurni, 2017).

### **2. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kajian studi kepustakaan (*library research*). Sumber kajian berasal dari jurnal, serta hasil penelitian (skripsi, tesis, dan disertasi) yang ada di internet yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yakni tentang sikap Jepang dalam menghadapi pengaruh dari modernisasi militer. Data yang diperoleh penulis lalu dikumpulkan melalui studi kepustakaan ini sehingga akan menghasilkan sebuah data sekunder yang digunakan

sebagai bahan analisis dalam tulisan ini. Proses penelitian ini meliputi identifikasikan teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan topik penelitian. (Pransiska, 2018)

### 3. Metode Analisa

Metode analisa yang digunakan oleh penulis adalah tipe analisa eksplanatif kualitatif. Metode analisa ini mempunyai tujuan menjawab pertanyaan terkait “Bagaimana?” atau “*How?*” dengan menganalisa hubungan antar variabel. Metode analisa eksplanatif mempunyai tujuan menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel. Sehingga dapat diketahui bagaimana korelasi antara dua atau lebih variabel baik pola, arah, sifat, bentuk, maupun kekuatan hubungannya (Tiffani, 2018).

#### **F. JANGKAUAN PENELITIAN**

Penulis membatasi jangkauan penelitian dengan tidak terlalu memperluas bahasanya agar keefektifitas sebuah karya tulis tetap terjaga. Jangkauan penelitian pada tulisan ini akan berfokus pada era modernisasi China hingga era kepemimpinan Xi Jinping dan restorasi Meiji hingga era kepemimpinan PM Shinzo Abe.

#### **G. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apa saja strategi yang dilakukan Jepang serta sikap yang dikeluarkan untuk merespon pengaruh dari modernisasi militer China yang terus berkembang serta faktor yang mendukung militer China untuk dapat berkembang pesat hingga saat ini.

#### **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistem penulisan pada tulisan ini terbagi menjadi tiga

bab dengan urutan sebagai berikut:

**BAB I** : berisikan **PENDAHULUAN** yang terdiri dari beberapa poin antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesis, metode penelitian dan, sistematika penulisan.

**BAB II** : membahas tentang isi dari tulisan ini yang terbagi dalam 2 sub bab antara lain:

Modernisasi Militer China pasca Perang Dingin. Sub bab ini akan menjelaskan mengenai awal mula modernisasi militer China atau *People's Liberation Army* (PLA) pasca perang dingin yang terus berkembang hingga masa kepemimpinan Xi Jinping. Pada sub bab kedua; Kebijakan keamanan Jepang terkait modernisasi militer China. Sub bab ini akan menjelaskan tentang awal mula aliansi Jepang dan Amerika Serikat serta kebijakan keamanan Jepang terkait modernisasi militer China (PLA) pasca perang dingin dan masa kepemimpinan PM Shinzo Abe. Dan pada sub bab terakhir yaitu Pengaruh modernisasi militer China terhadap sikap Jepang di kawasan Asia-Pasifik serta strategi yang digunakan oleh pemerintah Abe terkait modernisasi militer China. Pada sub bab yang terakhir ini akan membahas mengenai respon Jepang dalam menghadapi kebangkitan militer China dikawasan Asia-Pasifik serta hubungan politik Jepang dan China.

**BAB III** : merupakan **PENUTUP** yang didalamnya berisi kesimpulan dari hasil analisis keseluruhan BAB sebelumnya yang telah disimpulkan.